

Pengaruh Industri Mikro dan Kecil terhadap Kemiskinan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

The Effect of Micro and Small Scale Industry Towards Poverty in DI Yogyakarta

Mishbahuddin Dhiyaa'ulhaq¹, Sahara¹, Bambang Juanda¹

Diterima : 24 Juli 2017

Disetujui: 24 April 2018

Abstrak Kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan bagi setiap daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan sendiri terjadi salah satunya karena disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan ikut menjadi penyebab semakin tingginya tingkat kemiskinan di daerah perdesaan. Industri mikro dan kecil merupakan sektor yang dapat tumbuh di seluruh wilayah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola penyebaran kemiskinan dan pengaruh industri mikro dan kecil terhadap kemiskinan di wilayah D.I. Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Moran's I, Moran's Scatterplot, Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA), dan analisis model regresi Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil analisis memperlihatkan adanya pola hubungan spasial persentase penduduk miskin antar kecamatan, dengan tiga pola hubungan, yaitu High-High (HH), Low-Low (LL), dan Low-High (LH). Tenaga kerja dan investasi industri mikro dan kecil secara signifikan dapat mengurangi persentase kemiskinan di sebagian besar kecamatan di D.I. Yogyakarta, kecuali di kecamatan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Kata kunci : Industri Mikro dan Kecil, Investasi, Kemiskinan, Tenaga Kerja

Abstract: Poverty is still a major problem in the development for each region, including in DI Yogyakarta. Poverty itself has happened because of the higher rate of unemployment, development disparities between rural and urban areas has also become one of higher poverty level factors in rural areas. Micro and small scale industry is a sector that can grow in each area, and it can absorb lots of employments in a bigger amount. The aims of this research was to analyze spreading poverty pattern, and the effect of micro and small scale industry towards poverty in DI Yogyakarta. Analysis method used was Moran's I analysis, Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA), and Geographically Weighted Regression (GWR). The Analysis result showed there was a pattern of spatial poverty citizen relationship percentage among district with three relationship pattern such as High-High relationship (HH), Low-Low relationship (LL), and Low-High relationship (LH). Employment and investment of micro and small scale industry has significantly had negative effect towards the poverty percentage in most of district in DI Yogyakarta, except in teh district on the Yogyakarta City and sorrounded.

Keywords: Employment, Investment, Micro and Small Scale Industry, Poverty

¹ Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor

Korespondensi : mishbahuddin.d@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita penduduk serta kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok, turunnya angka kemiskinan, tersedianya lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan yang merata dalam masyarakat (Jhingan, 2008). Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Jadi, kinerja pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus tetap mempertimbangkan penurunan kemiskinan serta penanganan ketimpangan pendapatan. Pembangunan wilayah berbasis sumber daya diharapkan mampu mengarahkan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainable*). Kemiskinan menjadi isu utama pembangunan karena tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan proses pembangunan. Selain itu, kemiskinan menunjukkan ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya distribusi pendapatan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam mengelola tata pemerintahannya, selain itu kondisi geografis D.I. Yogyakarta juga sangat strategis, terutama sebagai penghubung daerah di pesisir Pulau Jawa bagian selatan. Namun demikian kondisi tersebut tidak serta merta memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakatnya. Hal tersebut tergambar dari tingginya tingkat persentase kemiskinan di D.I. Yogyakarta, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, rata-rata tingkat persentase kemiskinan D.I Yogyakarta dari tahun 2012 sampai tahun 2015 paling tinggi (BPS, 2016). Kemiskinan dapat ditimbulkan oleh kebijakan yang bias dan tidak menyentuh pada akar permasalahan penyebab kemiskinan itu sendiri. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada tahun 2015 di D.I. Yogyakarta, persentase penduduk miskin yang tinggal di pedesaan sebesar 16,63%, sedangkan persentase penduduk miskin yang tinggal di perkotaan sebesar 11,79%. Persentase penduduk miskin yang tinggal di pedesaan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 paling tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin yang tinggal di pedesaan di provinsi lain di Pulau Jawa (BPS, 2016). Tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan disebabkan karena pembangunan yang tidak berorientasi pada pemerataan, selama ini pembangunan hanya dikonsentrasikan untuk pertumbuhan.

Karakteristik kemiskinan wilayah yang berdekatan biasanya memiliki hubungan terkait dengan penyebab kemiskinan di wilayah yang berdekatan tersebut, hal ini merujuk pada hukum I Tobler untuk geografi, yang menyatakan semua hal saling berkaitan, tetapi sesuatu yang dekat akan memiliki kaitan yang lebih daripada sesuatu yang jauh (Tobler, 1970). Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan kemiskinan pada wilayah yang memiliki karakteristik kemiskinan yang sama, tentu memiliki solusi yang sama. Demikian juga dengan wilayah yang karakteristik kemiskinannya berbeda tentu solusi yang diberikan juga harus berbeda. Pendekatan wilayah harusnya sudah digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Semakin kecil pendekatan wilayah yang digunakan, akan semakin baik solusi yang didapatkan. Misalnya program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan wilayah pada level kecamatan akan lebih baik jika dibandingkan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan wilayah pada level kabupaten.

Salah satu kegiatan ekonomi yang sejalan dengan prioritas pembangunan dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia adalah industri mikro dan kecil (IMK). Industri

mikro dan kecil di D.I. Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Industri mikro dan kecil di D.I. Yogyakarta menyerap tenaga kerja yang sangat besar, yaitu mencapai 326.669 orang tenaga kerja pada tahun 2015, atau sebesar 17,27% dari total tenaga kerja di D.I. Yogyakarta (BPS D.I. Yogyakarta, 2016). Kontribusi tersebut menempati peringkat kedua setelah lapangan kerja dari sektor pertanian yang sebesar 23,08%. Jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor industri besar dan sedang di D.I. Yogyakarta yang hanya mampu menyerap sebanyak 56.429 tenaga kerja pada tahun 2015 (BPS D.I. Yogyakarta, 2016).

Selain itu nilai investasi per unit usaha yang tidak terlalu besar pada sektor ini memudahkannya dalam berkembang, dan menyebar merata di seluruh wilayah. Meskipun secara investasi per unit usaha IMK kecil, akan tetapi secara agregat IMK di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I. Yogyakarta total investasinya mencapai 1,187 triliun rupiah. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor IMK memperlihatkan betapa pentingnya peranan IMK dalam membantu memecahkan masalah pengangguran sebagai salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Lokasinya yang banyak di perdesaan membuat keberadaan dari IMK akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah, dan pembangunan ekonomi, terutama di wilayah perdesaan (Simatupang et al., 1994; Kuncoro, 1996). Dengan kata lain, pengembangan IMK merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang *pro-poor* dan *pro-job*. Sesuai dengan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola penyebaran kemiskinan di D.I. Yogyakarta, serta menganalisis secara spasial pengaruh IMK terhadap kemiskinan di wilayah D.I. Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini dilakukan di D.I. Yogyakarta dengan menggunakan data yang diperoleh pada tahun 2015. Karakteristik kemiskinan antar kecamatan di D.I. Yogyakarta dianalisis menggunakan Moran’s I untuk membuktikan bahwa terdapat dependensi spasial atau pengaruh spasial antar kecamatan. Berikut ini adalah formula untuk menghitung indeks Morran’s I:

$$I = \frac{N \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

keterangan:

- I : Indeks Moran
- N : Banyak lokasi kejadian
- X_i : Jumlah kejadian variabel pada kecamatan i
- X_j : Jumlah kejadian variabel pada kecamatan j
- \bar{x} : Rata-rata dari jumlah kejadian variabel x
- W_{ij} : Elemen pada bobot matriks antara daerah i dan j,

Jika dengan analisis Moran’s I diketahui terdapat dependensi spasial, maka untuk melihat pola hubungan spesifik secara lokal persentase kemiskinan di setiap kecamatan

dilanjutkan dengan analisis uji *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA) untuk mengidentifikasi autokorelasi. Berbagai literatur menyebutkan syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pada teori pertumbuhan Harrod-Domar, Investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2008). Investasi memiliki dua peranan penting yaitu pertama, investasi menciptakan pendapatan dan kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital. Menurut Sileika & Bekeryte (2013), tingkat pengangguran memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan, Hal ini juga ditemukan Fatma (2005) dalam penelitiannya bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Sedangkan Herman & Georgescu (2012) menemukan hubungan erat antara jumlah lapangan kerja dan tingkat kemiskinan. Otsuka *et al* (2010) menemukan dalam penelitiannya bahwa lapangan pekerjaan dapat mengurangi kemiskinan di beberapa negara. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan variabel tenaga kerja dan investasi industri mikro dan kecil di D.I. Yogyakarta sebagai variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap persentase kemiskinan di setiap kecamatan dengan model regresi *Geographically Weighted Regression* (GWR). Model operasional GWR yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$MSKN_i = \beta_{0(ui,vi)} + \beta_{1(ui,vi)}TNK_i + \beta_{2(ui,vi)}INV_i + \varepsilon_i$$

keterangan:

$MSKN_i$: Persentase penduduk miskin di kecamatan ke- i (%)

TNK_i : Jumlah tenaga kerja IMK di kecamatan ke- i (orang)

INV_i : Nilai investasi IMK di kecamatan ke- i (milyar rupiah)

(u_i, v_i) : Koordinat lintang, bujur dari titik ke- i pada suatu lokasi geografis

$\beta_k(u_i, v_i)$: Koefisien peubah ke- k pada masing-masing lokasi

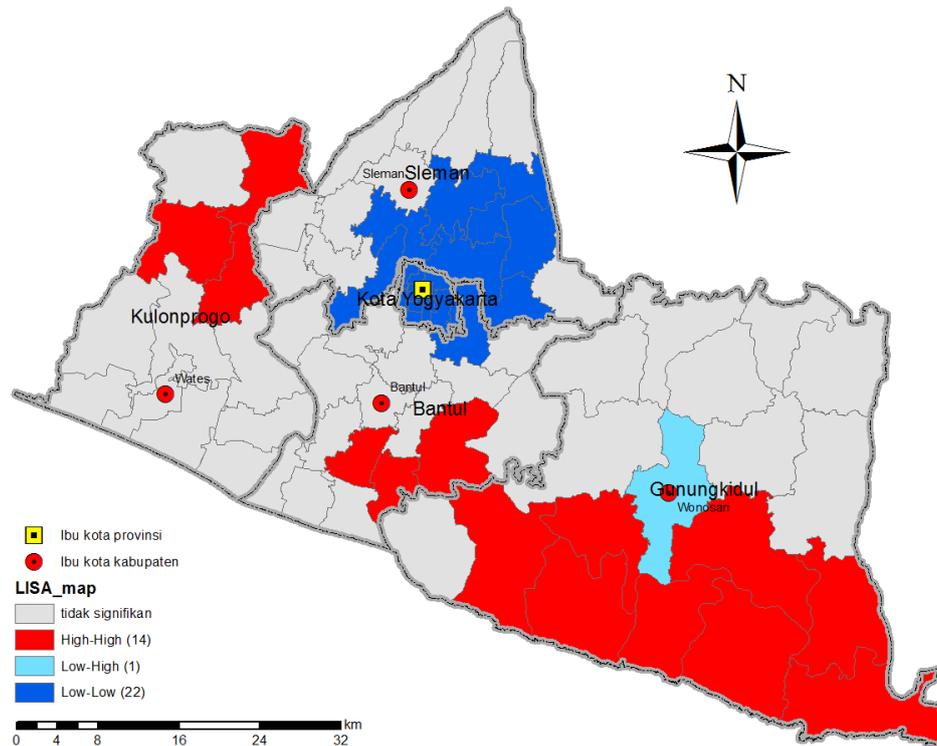
ε_i : *Error*

Pada model GWR diasumsikan bahwa data observasi yang dekat dengan titik ke- i mempunyai pengaruh yang besar pada penaksiran dari $\beta_k(u_i, v_i)$ daripada data yang berada jauh dari titik ke- i . Menurut Fotheringham *et al.* (2002), lokal parameter $\beta_k(u_i, v_i)$ ditaksir menggunakan *Weighted Least Squared* (WLS). Pada GWR sebuah observasi ke- i diboboti dengan nilai yang berhubungan dengan titik tersebut. Bobot w_{ij} , untuk $j = 1, 2, \dots, n$, pada tiap lokasi (u_i, v_i) diperoleh sebagai fungsi yang kontinu dari jarak antara titik ke- i dan titik data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis autokorelasi spasial dengan uji Moran's I yang dilakukan, membuktikan adanya otokorelasi spasial, hal tersebut menunjukkan bahwa ada keterkaitan nilai persentase penduduk miskin antar kecamatan di D.I. Yogyakarta. Hasil dari uji moran's I menunjukkan bahwa pola hubungan persentase kemiskinan antar kecamatan di D.I. Yogyakarta adalah mengelompok (*clustered*) dengan nilai *moran's index* sebesar 0,616295. Hasil analisis dengan menggunakan *moran's scatterplot* memperlihatkan pola hubungan persentase kemiskinan di setiap kecamatan di D.I. Yogyakarta dominan pada kuadran I dan kuadran III (Gambar 1). Kuadran I memperlihatkan pola hubungan kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan tinggi dikelilingi oleh wilayah dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi juga, sedangkan pola hubungan pada kuadran III adalah kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan rendah dikelilingi oleh kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan rendah pula. Hasil analisis *moran's scatterplot* ini mengonfirmasi hasil uji Moran's I yang memperlihatkan adanya autokorelasi spasial persentase kemiskinan antar kecamatan di D.I. Yogyakarta dengan pola hubungan mengelompok. Hasil pengujian LISA

pada Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa kecamatan yang persentase kemiskinannya memiliki autokorelasi spasial dengan persentase kemiskinan kecamatan di sekitarnya hanya ada 3 pola hubungan, yaitu pola *High-High* (HH) atau kuadran I dalam *moran's scatterplot*, *Low-Low* (LL) atau kuadran III dalam *moran's scatterplot*, dan satu kecamatan yang memiliki hubungan *Low-High* (LH) atau kuadran II dalam *moran's scatterplot*, yaitu Kecamatan Wonosari yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Gunung Kidul.



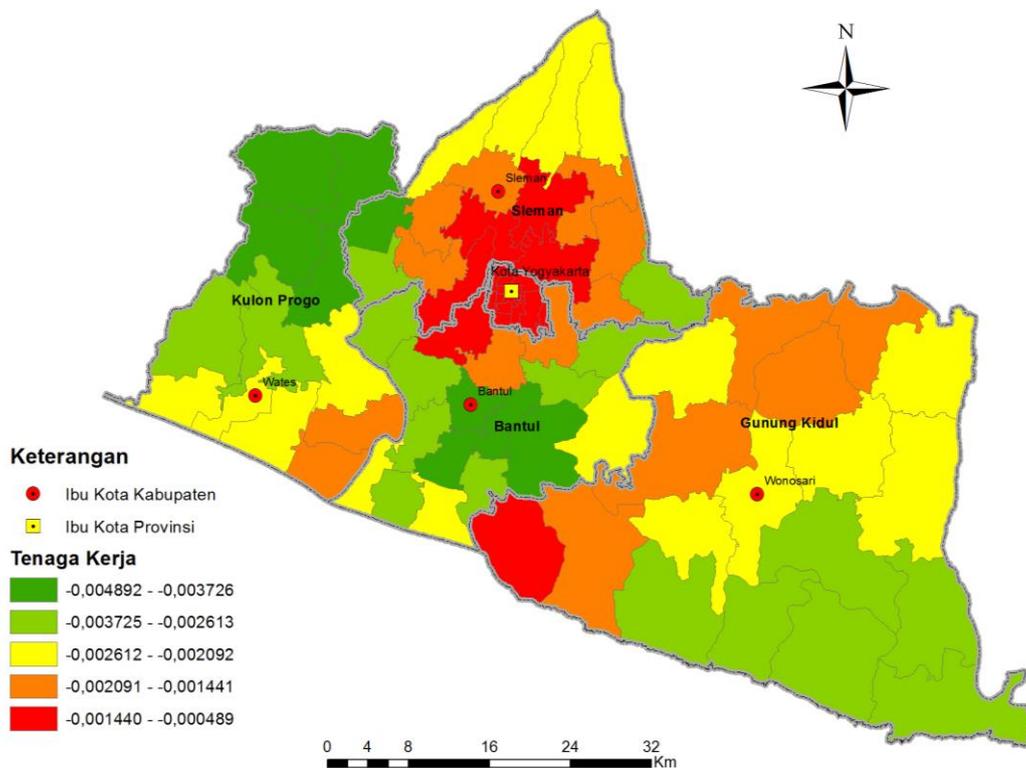
Sumber: Hasil Analisis 2017

Gambar 1. LISA Cluster Map Persentase Penduduk Miskin di DI Yogyakarta

Secara umum seperti yang terlihat pada Gambar 1, terdapat 14 kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dan dikelilingi oleh kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi (HH) berada di 3 Kabupaten, yaitu di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara, dan sebagian besar berada di wilayah selatan Kabupaten Gunung Kidul sampai beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah yang berdekatan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin rendah dan dikelilingi oleh kecamatan dengan persentase penduduk miskin rendah (LL) terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu semua kecamatan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta; Kecamatan Banguntapan yang berada di Kabupaten Bantul yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta; Kecamatan Berbah, Kalasan, Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, dan Gamping yang berada di Kabupaten Sleman, wilayah yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta.

Hasil pemodelan GWR untuk melihat pengaruh tenaga kerja IMK terhadap persentase kemiskinan di D.I. Yogyakarta memberikan hasil dugaan yang berbeda pada setiap unit amatan (kecamatan), seperti yang bisa terlihat pada Gambar 2, yang menggambarkan variasi spasial pengaruh tenaga kerja sektor industri mikro dan kecil terhadap persentase

kemiskinan di setiap kecamatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tenaga kerja IMK memiliki hubungan yang negatif terhadap persentase kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Hal itu berarti setiap penambahan tenaga kerja yang bekerja di sektor IMK di suatu kecamatan, maka persentase kemiskinan di kecamatan tersebut akan berkurang. Model dugaan GWR pengaruh penyerapan tenaga kerja di sektor IMK terhadap pengurangan persentase kemiskinan di kecamatan paling tinggi terdapat di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. Secara parsial, koefisien variabel tenaga kerja IMK di Kecamatan Samigaluh sebesar $-0,00489$. Sedangkan dugaan model GWR pengaruh penyerapan tenaga kerja di sektor IMK terhadap pengurangan persentase kemiskinan di kecamatan paling rendah terdapat di Kecamatan Purwosari yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Secara parsial, koefisien variabel tenaga kerja IMK di Kecamatan Purwosari sebesar $-0,0004889$.

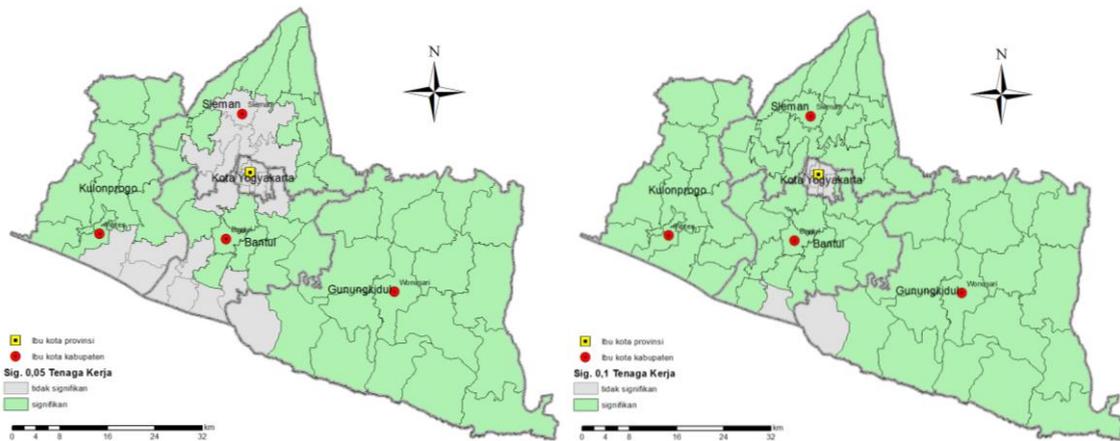


Sumber: Hasil Analisis 2017

Gambar 2. Variasi Spasial Dugaan Model GWR Pengaruh Tenaga Kerja IMK Terhadap Persentase Kemiskinan

Jika dilihat signifikansinya (Gambar 3), tenaga kerja IMK pada tingkat signifikan 5% tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan, antara lain seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta; kecamatan Banguntapan, Kasihan, Kretek, Pandak, Pundong, Sanden, dan Srandakan yang berada di Kabupaten Bantul; kecamatan Purwosari di Kabupaten Gunung Kidul; kecamatan Galur, Lendah, dan Panjatan yang berada di Kabupaten Kulon Progo; kecamatan Depok, Gamping, Godean, Mlati, Ngaglik, dan Sleman yang berada di Kabupaten Sleman. Jika dilihat secara umum, kecamatan yang tenaga kerja IMK di wilayahnya tidak berpengaruh signifikan (sig. 5%) terhadap tingkat kemiskinan, berada di pusat Kota Yogyakarta dan kecamatan di sekitarnya, serta kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pesisir selatan bagian tengah, perbatasan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo.

Sedangkan pada tingkat signifikan 10% (Gambar 3), tenaga kerja IMK berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan hampir di seluruh wilayah kecamatan di D.I. Yogyakarta, kecuali di Kecamatan Purwosari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul, Kecamatan Kretek yang berada di Kabupaten Bantul bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul, kedua kecamatan tersebut saling berbatasan langsung. Selain di kedua kecamatan tersebut, hampir seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, kecuali Kecamatan Kota Gede, tenaga kerja IMK di kecamatan-kecamatan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (sig. 10%).

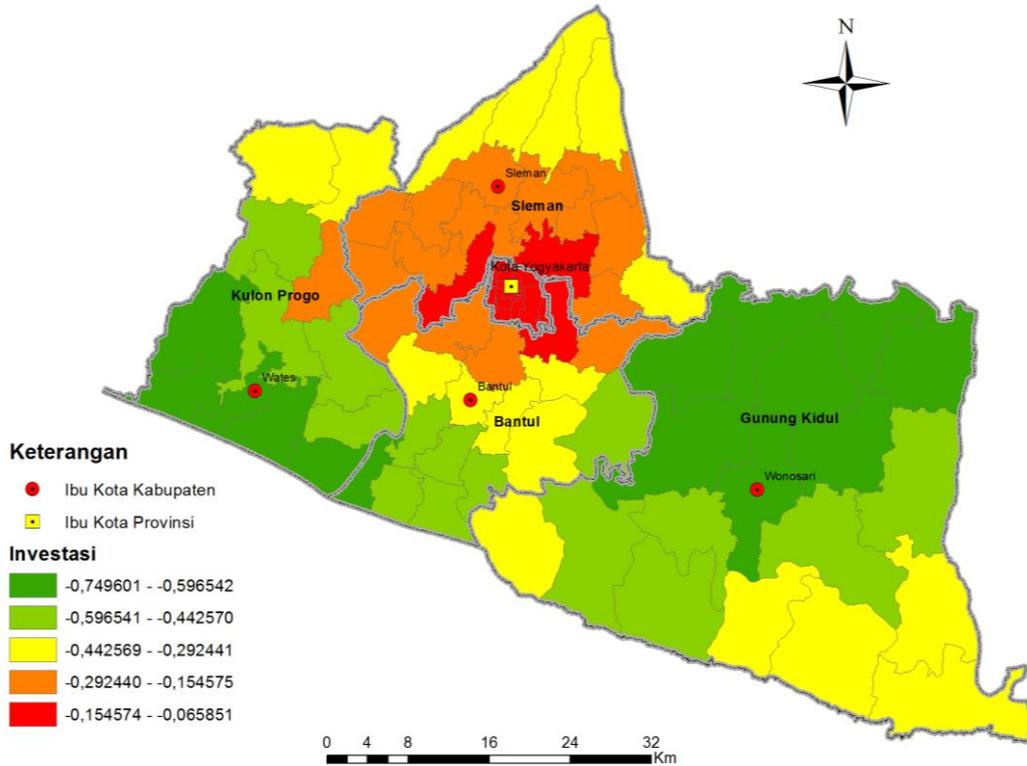


Sumber: Hasil Analisis 2017

Gambar 3. Tingkat Signifikansi GWR dengan Sig. 5% (Kiri) dan Sig. 10% (Kanan), Pengaruh Tenaga Kerja IMK Terhadap Kemiskinan

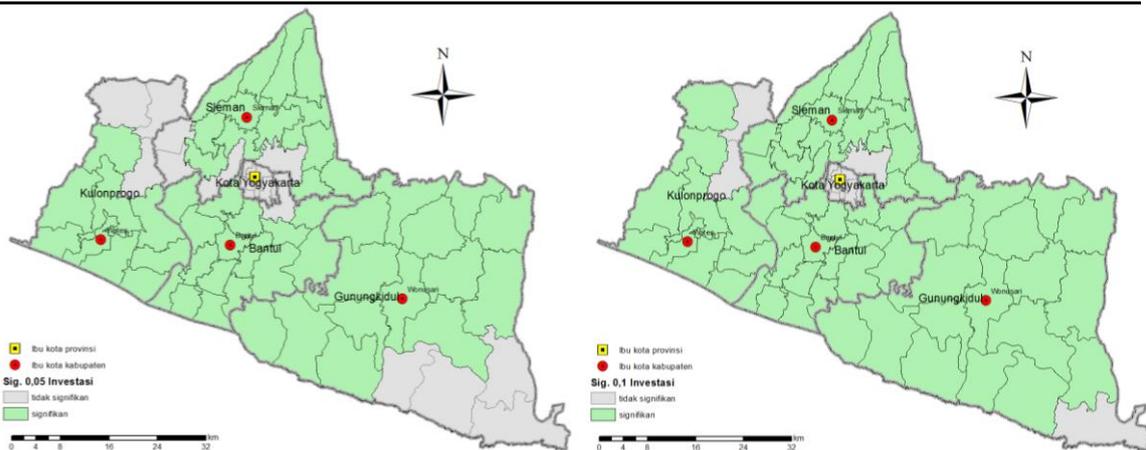
Menurut Kuncoro (2004), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Salah satu masalah yang menimbulkan tingginya angka kemiskinan adalah rendahnya investasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Hal itu bisa dimaklumi karena dengan rendahnya pendapatan, maka kesempatan menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang produktif menjadi sangat kecil. Salah satu kondisi inilah yang membentuk lingkaran yang tidak jelas awal dan akhirnya sehingga membentuk lingkaran yang tidak berujung, atau sering disebut lingkaran setan kemiskinan (*visious circle of poverty*). Selain itu distribusi pendapatan yang tidak merata antara desa dan kota juga turut andil dalam memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis pengaruh investasi di sektor industri mikro dan kecil (IMK) terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta dengan model GWR agar dapat melihat variasi spasial pengaruh investasi IMK terhadap kemiskinan di setiap wilayah. Hasil analisis dugaan model GWR variabel investasi IMK terhadap persentase penduduk miskin memiliki model dugaan yang negatif, artinya peningkatan investasi IKM memberikan efek negatif terhadap persentase kemiskinan. Model GWR memungkinkan variasi model dugaan yang berbeda-beda di setiap kecamatan (Gambar 4). Model dugaan pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat di Kecamatan Ngawen yang berada di Kabupaten Gunungkidul sebesar -0,69617. Sedangkan pengaruh investasi IMK terhadap tingkat kemiskinan paling kecil terdapat di Kecamatan Depok yang berada di Kabupaten Sleman, yaitu sebesar -0,12053. Sedangkan rata-rata untuk seluruh wilayah kecamatan di D.I.

Yogyakarta, model dugaan pengaruh investasi IMK terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar -0,3643.



Sumber: Hasil Analisis 2017

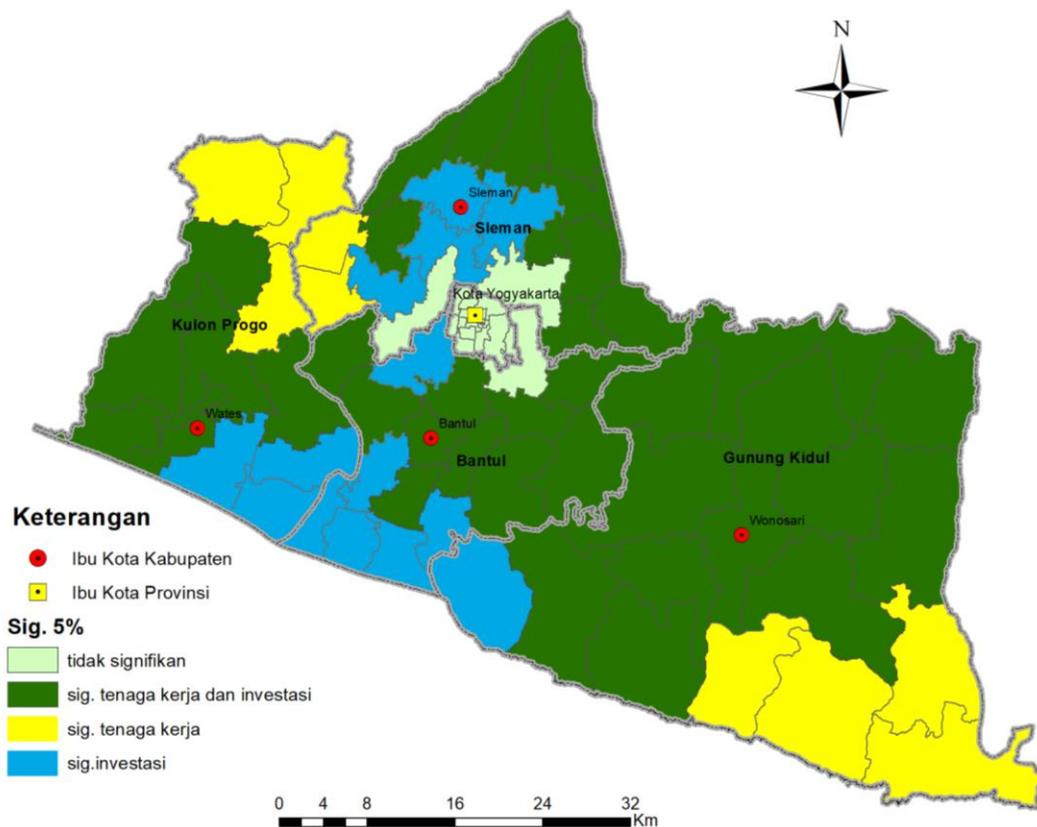
Gambar 4. Variasi Spasial Dugaan Model GWR Pengaruh Investasi IMK terhadap Persentase Kemiskinan



Sumber: Hasil Analisis 2017

Gambar 5. Tingkat Signifikansi GWR dengan Sig. 5% (Kiri) dan Sig. 10% (Kanan), Pengaruh Investasi IMK terhadap Kemiskinan

Investasi IMK di D.I. Yogyakarta memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan di 60 kecamatan pada tingkat signifikan 10%, sedangkan pada tingkat signifikan 5%, investasi IMK memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di 26 kecamatan, tingkat signifikansi pengaruh investasi IMK terhadap penurunan tingkat persentase kemiskinan di D.I. Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 5. Seperti pada variabel tenaga kerja, investasi IMK tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat kemiskinan di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta, dan daerah di sekitarnya, terutama pada taraf signifikan 5%, lebih banyak wilayah yang investasi IMK di wilayahnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Wilayah yang investasi IMK di daerahnya hanya berpengaruh kecil terhadap tingkat kemiskinan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Terutama pada tingkat signifikan 5%, hal itu terjadi di seluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Depok, Gamping, dan Banguntapan. Selain itu kecamatan lain yang tidak signifikan pada taraf signifikan 5% adalah Kecamatan Moyudan dan Minggir yang berada di Kabuapten Sleman dan masih berdekatan dengan Kota Yogyakarta; kecamatan Kalibawang, Nanggulan, dan Samigaluh yang berada di Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Tanjung Sari, Tepus, Girisubo, dan Rongkop di Kabupaten Gunung Kidul.



Sumber: Data Olah, 2017.

Gambar 6. Tingkat Signifikansi GWR dengan sig. 5%, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja IMK terhadap Kemiskinan

Gambar 6 menjelaskan bahwa, IMK dari sisi tenaga kerja maupun investasi pada tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa secara signifikan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di sebagian besar wilayah kecamatan di DI Yogyakarta, kecuali di Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu Kecamatan Banguntapan di Kabupaten Bantul, serta Kecamatan Gamping dan Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman. Jika dilihat pada Tabel 20, dari sisi tenaga kerja maupun jumlah unit usaha IMK di wilayah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal itu mungkin menjadi salah satu faktor mengapa IMK belum secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan di Kota Yogyakarta, karena lapangan pekerjaan yang dapat disediakan sektor IMK tidak sebanding dengan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Berdasarkan data BPS DI Yogyakarta (2016), pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di DI Yogyakarta, pada tahun 2015 pengangguran terbuka Kota Yogyakarta mencapai 5,52%, lebih tinggi jika dibandingkan pengangguran terbuka secara keseluruhan DI Yogyakarta yang hanya sebesar 4,55%, begitu juga dengan Kabupaten Sleman yang beberapa wilayah kecamatan di daerah tersebut tenaga kerja dan investasi IMK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 mencapai 5,39% (BPS DI Yogyakarta, 2016). Hal ini juga sesuai dengan penelitian

Selain itu juga ada beberapa kecamatan yang tidak signifikan pada salah satu variabel saja, diantaranya 4 kecamatan di Kabupaten Sleman yang meliputi Kecamatan Ngaglik, Godean, Mlati, dan Sleman; 6 kecamatan di Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Kasihan, Sanden, Pandak, Srandakan, Kretek, dan Pundong; 3 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Galur, Panjatan, dan Lendah; dan Kecamatan Purwosari di Kabupaten Gunung Kidul, di daerah tersebut tenaga kerja IMK tidak signifikan mengurangi kemiskinan. Sedangkan di 3 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, dan Nanggulan; 4 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul yang meliputi Kecamatan Tanjung Sari, Tepus, Girisubo, dan Rongkop; serta Kecamatan Moyudan dan Minggir di Kabupaten Sleman, investasi IMK tidak berpengaruh signifikan mengurangi kemiskinan. Wilayah yang tenaga kerja IMK signifikan mengurangi kemiskinan sebagian besar berada jauh dari Kota Yogyakarta, sedangkan wilayah kecamatan yang hanya investasi IMK yang berpengaruh signifikan sebagian besar berada di dekat Kota Yogyakarta.

Tingginya biaya hidup dan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS di Kota Yogyakarta jika dibandingkan dengan kabupaten lain, mungkin bisa menjadi penyebab kegagalan IMK dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagaimana lazimnya sektor mikro kecil lainnya, IMK memiliki biasanya merupakan sektor informal dengan pekerja tidak terdidik dengan upah yang kecil. Sebagai contoh Kecamatan Kasihan dan Banguntapan merupakan kecamatan di Kabupaten Bantul yang menjadi sentra industri kecil logam dan bahan bangunan. Kedua wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, di Kecamatan Kasihan, hanya investasi IMK yang berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Sedangkan di Kecamatan Banguntapan, tenaga kerja dan investasi IMK tidak signifikan mengurangi kemiskinan. Industri logam dan bahan bangunan merupakan sektor yang padat modal, sehingga dengan keterbatasan modal para pelaku IMK tentu berpengaruh terhadap skala usaha IMK di sektor logam dan bahan bangunan.

Pengaruh IMK terhadap pengurangan persentase kemiskinan yang tidak signifikan di kota besar seperti di Kota Yogyakarta biasanya dipengaruhi oleh kemampuan IMK yang tidak dapat memberikan upah yang layak pada tenaga kerjanya, hal ini terjadi seperti pada penelitian Tambunan (2012). Sehingga tenaga kerja yang bekerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah biasanya kesulitan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Berbeda dengan di daerah pedesaan, dimana standar biaya hidup masih rendah dan ketersediaan bahan baku untuk produksi yang masih sangat melimpah, sehingga aktifitas usaha kecil

dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Secara teori, hubungan antara keberadaan IMK dan kemiskinan di suatu daerah bisa “positif” atau “negatif”. Positif dalam arti keberadaan IMK karena ada kemiskinan. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Secara umum di manapun juga, sebuah perusahaan muncul karena ada daya tarik pasar, baik pasar *output* (peluang untuk menjual hasil produksi) dan pasar *input* (peluang untuk mendapatkan *input* untuk memproduksi). Hubungan ini juga berlaku bagi pertumbuhan IMK. Hanya saja, di banyak negara berkembang, keberadaan pasar *output* dan pasar *input* yang membuat jumlah IMK tumbuh pesat berhubungan erat dengan kemiskinan.

Sedangkan, negatif artinya kemiskinan berkurang karena adanya IMK, dan dalam menganalisisnya harus dilihat dampak keseluruhan dari keberadaan IMK, yaitu lewat jalur langsung dan tidak langsung, yang menciptakan efek penggandaan (*multiplier*). Jalur langsung misalnya lewat keberadaan IMK berdampak positif terhadap pengurangan jumlah orang miskin adalah besarnya kesempatan kerja yang diciptakan oleh IMK itu sendiri (efek kesempatan kerja langsung) dari kegiatan produksinya. Produk yang dibuat bisa bersifat barang jadi yang dikonsumsi langsung oleh konsumen (misalnya makanan dan minuman) atau barang perantara sebagai bahan baku atau *input* bagi kelompok usaha lain lewat keterkaitan produksi *subcontracting*. Dilihat dari sisi IMK, hubungan produksinya dengan kelompok industri lain tersebut disebut disebut keterkaitan ke depan (*forward linkage*), hubungan IMK dengan kegiatan usaha lainnya tidak hanya hubungan keterkaitan ke depan, tetapi juga keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Misalnya IMK pembuat makanan membeli komoditas pertanian sebagai bahan bakunya. Hal tersebut merupakan efek penciptaan kesempatan kerja tidak langsung dari keberadaan IMK.

KESIMPULAN

Persentase penduduk miskin antar kecamatan di DI Yogyakarta memiliki hubungan autokorelasi spasial, artinya tingkat persentase penduduk miskin di satu kecamatan dipengaruhi oleh persentase penduduk miskin kecamatan di sekitarnya. Serta kemiskinan di DI Yogyakarta memiliki pola penyebaran yang mengelompok berdasarkan tingkat persentase kemiskinan di setiap kecamatan. Terdapat tiga pola hubungan kemiskinan antar kecamatan di DI Yogyakarta, yaitu pola hubungan kecamatan dengan persentase penduduk miskin rendah di kelilingi oleh kecamatan dengan persentase penduduk miskin rendah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan kecamatan di sekitarnya, terutama sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. Pola hubungan yang kedua adalah kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi dikelilingi oleh kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi, hal ini terjadi di sebagian besar kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul bagian selatan, sebagian kecil kecamatan di Kabupaten Bantul yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul, serta sebagian kecil kecamatan yang berada di Kabupaten Kulon Progo bagian utara. Pola hubungan yang ketiga yaitu kecamatan dengan persentase penduduk miskin rendah dikelilingi oleh kecamatan dengan kecamatan dengan persentase penduduk miskin tinggi, hal ini terjadi di Kecamatan Wonosari yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Gunung Kidul.

Investasi dan tenaga kerja industri mikro dan kecil secara signifikan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah DI Yogyakarta, terutama di wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut berarti peningkatan investasi maupun tenaga kerja dapat mengurangi persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta. Investasi dan tenaga kerja industri mikro dan kecil tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta dan beberapa kecamatan di sekitarnya, terutama wilayah kecamatan di sekitar Kota Yogyakarta yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. Indonesia dalam Angka 2016. Jakarta (ID): BPS.
- BPS D.I. Yogyakarta. 2016. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016: Yogyakarta (ID): BPS D.I. Yogyakarta
- Fatma FS. 2005. Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. [Tesis]. Depok (ID): Universitas Indonesia.
- Fotheringham AS, Brunson C, Charlton M. 2002. *Geographically Weighted Regression the Analysis of Spatially Varying Relationships*. England (GB): John Wiley and Sons.
- Herman E, Georgescu MA. 2012. Employment strategy for poverty reduction. A Romanian perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 58(2012):406-415.
- Jhingan ML. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro M. 1996. Struktur dan Kinerja Ekonomi Indonesia Setelah 50 Tahun Merdeka : Adakah Peluang Usaha Kecil ?. *Jurnal Ekonomi*. 2(7): 31-44.
- Kuncoro M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta(ID): Penerbit Erlangga.
- Otsuka K, Estudillo JP, Yamano T. 2010. The Role of Labor Markets and Human Capital in Poverty Reduction: Evidence from Asia and Africa. *Asian Journal of Agriculture and Development*.7(1):23-40.
- Sileika A, Bekeryte J. 2013. Theoretical issues of relationship between unemployment, poverty and crime in sustainable development. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2(3): 59-70.
- Simatupang P, Togatorop MH, Sitompul RP, Tambunan T. 1994. Prosiding Seminar Nasional Peranan Strategis Industri Kecil dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1. Edisi 9. Munandar H, Puki AL, penerjemah. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: *Economics Development-Theories*
- Zhukov YM. 2010. Applied Spatial Statistics in R, Spatial Regression. IQSS, Harvard University.